



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
HIMBAUAN PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN BERDASARKAN  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN ASTA CITA PRESIDEN

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
  4. Para Ketua Lembaga;
  5. Para Kepala UPA;
  6. Ketua SPI;
  7. Kepala UPU
  8. Para Kepala Bagian
  9. Para Kepala Subbagian
  10. Para Ketua Tim Kerja
- Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
2. Asta Cita Presiden (Program Pembangunan 8 Prioritas Nasional).

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, seluruh unit di lingkungan Universitas Tidar diharapkan untuk melakukan penyusunan revisi POK Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tidar agar dalam proses penyusunan revisi POK Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Kepatuhan terhadap Kebijakan Nasional**

Seluruh revisi anggaran agar sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada optimalisasi belanja yang mendukung program prioritas nasional serta peningkatan pelayanan publik.



## 2. Selaras dengan Asta Cita Presiden

Penyusunan revisi anggaran agar mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya dalam hal penguatan sumber daya manusia, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Universitas Tidar.

## 3. Efisiensi dan Efektivitas

Pengalokasian anggaran harus dilakukan secara cermat dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan memiliki dampak maksimal terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Layanan Umum (IKU BLU) Tahun Anggaran 2025 dan pencapaian target Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 pada Renstra periode tahun 2025-2029.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam penyusunan revisi POK Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Magelang, 12 Februari 2025  
Rektor.



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.  
NIP. 196704301992031002



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;  
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
7. Para Gubernur; dan  
8. Para Bupati/Wali Kota.
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
1. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
  2. APBD . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
  - b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- KETIGA** : Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
  3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
    - a. Belanja pegawai; dan
    - b. Belanja bantuan sosial.

4. Efisiensi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diprioritaskan selain dari:
  - a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
  - b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
  - c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025.
  - d. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
5. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
6. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

**KEEMPAT** : Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

**KELIMA** : Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk:
  - a. Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
  - b. Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:
    - 1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
    - 2) Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

3) Dana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 3) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
  - 4) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - 5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
  - 6) Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- c. Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
2. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. Melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
  - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KEENAM** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,**



*[Handwritten signature]*  
**Lydia Silvanna Djaman**



KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

# ASTA CITA



**PRESIDEN &  
WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.